



ANALISIS PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Progress Analysis of Farmer Exchange Rates in South Kalimantan Province

Ike Dewi Yuliani^{*}, Sadik Ikhsan dan Kamiliyah Wilda

^{*}Program Studi Agribisnis/Jurusan SEP, Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. A. Yani km.36, Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Kata Kunci

NTP; Nilai Tukar Petani.

Korespondensi

Main author:

ike.dewi.yuliani@gmail.com

Corresponding author:

sikhsan@ulm.ac.id

Diterima: 30 January 2024,

Disetujui: 18 Februari 2024,

Diterbitkan on-line : 31 Maret 2024

Salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mengukur kesejahteraan petani di daerah pedesaan ialah Nilai Tukar Petani (NTP). Seiring berjalannya waktu, perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke industri mengakibatkan pendapatan petani lebih rendah, sehingga perubahan NTP lebih merugikan daripada menguntungkan petani. Disatu sisi, Kalimantan Selatan merupakan Provinsi yang masih mengandalkan perekonomiannya di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan dan menganalisis perbandingan antar NTP di subsektor tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perikanan, dan perkebunan rakyat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi data bulanan selama 10 tahun (2013 – 2022) yang terdiri dari data NTP, indeks harga yang diterima petani (It), dan indeks harga yang di bayar petani (ib). Berdasarkan hasil pada penelitian ini, perkembangan NTP subsektor yang mengalami defisit adalah subsektor tanaman pangan (98,8855) dan subsektor perkebunan rakyat (94,7985), sedangkan subsektor yang mengalami surplus adalah subsektor peternakan (106,351), subsektor perikanan (105,14017), dan subsektor tanaman hortikultura (104,386). Subsektor peternakan nyatanya memiliki rerata paling tinggi dari kelima subsektor di Kalimantan Selatan, sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat atau lebih baik, berbeda dengan subsektor perkebunan rakyat yang memiliki rerata paling rendah sehingga tingkat kesejahteraannya menurun.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional di Indonesia ialah pembangunan sektor pertanian karena menyangkut kehidupan lebih dari setengah penduduk nusantara. Sektor pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan, tetapi juga dalam

penyediaan bahan baku, ekspor, menciptakan lapangan kerja serta sebagai sumber pendapatan masyarakat (Yunita, 2008).

Mengingat aktivitas sektor pertanian banyak dilakukan di daerah pedesaan yang mana petani menggantungkan hidupnya dengan usaha tani budidaya, sangat diharapkan dukungan

pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan sektor pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani (Rachmat, 2013).

Menurut Krisnamurthi (2002), pendapatan yang diterima oleh petani dikatakan lebih rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh karyawan industri, hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian menjadi sektor industri serta melemahnya laju perkembangan pada sektor pertanian. Hal ini juga dapat tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP), yang mana harga yang diterima petani lebih kecil dari harga yang harus dibayarnya. Perubahan ini dapat mengakibatkan rendahnya nilai NTP, yang mengindikasikan adanya kemiskinan di daerah pedesaan terutama di sebagian besar rumah tangga petani yang memiliki lahan sempit (Krisnamurthi, 2009).

Dalam konteks ini, untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani biasanya menggunakan indikator yang salah satunya adalah NTP, yang mana NTP adalah rasio pada indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). It merupakan harga rerata produsen atas hasil produksi petani sebelum biaya angkutan atau transportasi dan biaya pengemasan juga diperhitungkan dalam harga jual, sedangkan Ib adalah harga eceran rerata dari barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani untuk memenuhi keperluan rumah tangga ditambah dengan pengeluaran untuk produksi, non produksi dan barang modal (BPS, 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2017), hal ini memberikan gambaran mengenai kemampuan dari tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dikonsumsi petani untuk rumah tangga maupun berproduksi, serta memperoleh akan gambaran mengenai perkembangan pendapatan petani. Pergerakan naik dan turunnya NTP mengindikasikan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani, sehingga secara relatif petani lebih sejahtera ketika semakin tinggi NTP maka semakin tinggi juga daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan konsumsinya (Nurasa, 2016).

Menurut BPS (2021), secara umum NTP terbagi menjadi tiga yaitu:

- i) $NTP > 100$ adalah keadaan dimana harga produk meningkat daripada kenaikan harga konsumsinya yang artinya petani surplus. Pendapatan petani pada saat ini tumbuh lebih

cepat ketimbang pengeluarannya, sehingga kesejahteraan petani menjadi lebih baik.

- ii) $NTP = 100$ adalah keadaan dimana kenaikan maupun penurunan pada harga produk sesuai dengan persentase penurunan atau kenaikan harga barang konsumsi petani. Artinya petani pada saat ini mengalami titik impas atau tidak mengalami perubahan, sehingga pada saat ini tingkat kesejahteraan petani tidak berubah.

- iii) $NTP < 100$ adalah keadaan dimana kenaikan pada harga produk lebih kecil ketimbang dengan naiknya harga barang yang dikonsumsi atau harga yang dibayar oleh petani meningkat. Artinya pada saat ini petani mengalami defisit. Sehingga, tingkat kesejahteraan petani menurun.

Di Kalimantan Selatan, sektor pertanian masih menjadi andalan dalam perekonomiannya dan juga memiliki kontribusi besar pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kalimantan Selatan. Adapun perbandingan NTP pada subsektor pertanian di Kalimantan Selatan tahun 2020 – 2021 yaitu terdapat kenaikan NTP yang dialami subsektor perkebunan rakyat (22,76%), subsektor tanaman hortikultura (3,95%), dan subsektor peternakan (1,02%). Berbeda dengan subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan yang defisit dengan angka -1,9% dan -0,49%.

Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, (1) mengetahui perkembangan NTP subsektor pertanian di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang (2013 – 2022). (2) membandingkan NTP antar subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor perikanan, dan subsektor perkebunan rakyat. dalam kurun waktu 10 tahun.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta referensi untuk masyarakat khususnya civitas tentang perkembangan NTP serta memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang NTP di Kalimantan Selatan, dan menjadi informasi serta pertimbangan bagi pemerintah dalam mengolah kebijakan terutama dalam hal NTP.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan waktu pelaksanaannya selama dua bulan (Mei – Juni) tahun 2023.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data deret waktu terdiri dari data NTP, Ib dan It. Data tersebut berupa data bulan selama 10 tahun (2013 – 2022) diperoleh dari BPS di Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis Data

Tujuan pertama penelitian menggunakan metode pemulusan data deret waktu. Data yang diteliti ialah NTP subsektor tanaman pangan, peternakan, tanaman hortikultura, perikanan, dan perkebunan rakyat.

Pemulusan data deret waktu yaitu metode sederhana dengan prinsip mengenali pola pada data dengan cara pemulusan variasi lokal dalam data. Hal ini berguna untuk mengamati suatu variabel bergerak dalam deret berkala cenderung mengarah ke suatu arah. Rata-rata bergerak dibuat dari data bulanan sebanyak 5 bulan, maka rata-rata bergerak bulanan berderajat 5 (*moving average of order 5*) (Gomez, 1995).

$$ma = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_5}{n}, \frac{Y_2 + Y_3 + \dots + Y_{5+1}}{n}, \dots, \frac{Y_3 + Y_4 + \dots + Y_{5+2}}{n}, \dots \text{ dan seterusnya} \quad (1)$$

Dengan: *ma* *moving average*
y NTP per-bulan (tanaman pangan; peternakan; tanaman hortikultura; perikanan; dan perkebunan rakyat)
n derajat rata-rata bergerak

Tujuan kedua penelitian menggunakan analisis ragam. Analisis ragam merupakan teknik analisis *multivariate* yang berguna untuk membedakan antar rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara banding variansi.

Sumber keragamannya adalah subsektor pertanian yaitu dengan membandingkan NTP

subsektor yang dapat mensejahterakan petani dalam kurun waktu 10 tahun.

Metode linier aditif yang digunakan adalah:

$$y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij} \quad (2)$$

Dengan: *i* Subsektor pertanian (tanaman pangan; peternakan; tanaman hortikultura; perikanan; dan perkebunan rakyat)
j Pengamatan/bulan
y Respon pengamatan NTP pada subsektor pertanian ke - *i* dan bulan (ulangan) ke - *j*
 μ Nilai tengah umum
 t_i Pengaruh subsektor pertanian ke - *i*
 e_{ij} Pengaruh pada galat acak

Tabel 1. Analisis Ragam

Sk	Db	Jk	Kt	F Hitung
Subsektor Pertanian	t-1	JkSP	KtSP	KtSP
Galat	t(n-1)	JkE	KtE	
Total	t.n-1	T.Sp		
SK	=	Sumber Keragaman		
Db	=	Derajat Bebas		
Jk	=	Jumlah Kuadrat		
Kt	=	Kuadrat Tengah		
JkSp	=	Jumlah Kuadrat Subsektor Pertanian		
JkE	=	Jumlah Kuadrat Error		
KtSP	=	Kuadrat Tengah Subsektor Pertanian		
KtE	=	Kuadrat Tengah Error		
T.Sp	=	Total Subsektor Pertanian		

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

Kriteria pengujian :

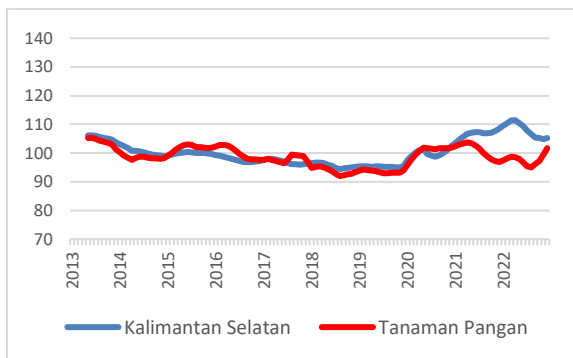
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: tolak H_0 , terima H_1 (yang diinterpretasikan signifikan)
- Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$: H_0 tidak dapat ditolak (yang diinterpretasikan tidak signifikan)

Apabila hasil uji analisis ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata (H_0 ditolak), untuk mengetahui subsektor pertanian mana yang sama atau berbeda maka dilanjutkan dengan uji beda nilai tengah dengan menggunakan analisis beda nyata terkecil (BNT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan NTP Per-Subsektor Kalimantan Selatan

Pada Gambar 1, perkembangan NTP Tanaman Pangan dari tahun 2013 sampai 2022 menunjukkan fluktuasi di sekitar angka 100, dengan sedikit peningkatan dan penurunan. Pada awalnya, NTP Tanaman Pangan berada di atas 100 dan kemudian menurun ke kisaran 100. Selama periode tersebut, NTP Tanaman Pangan bahkan sempat berada di atas NTP Kalimantan Selatan pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016, meskipun tidak jauh berbeda. Namun, hingga tahun 2021, NTP Tanaman Pangan mulai menurun, sementara NTP Kalimantan Selatan melonjak naik di atas angka 100. Dalam rentang 10 tahun, angka tertinggi NTP tanaman pangan adalah 106,32 di akhir tahun 2022, sedangkan angka terendahnya adalah 91,5 di pertengahan tahun 2018.

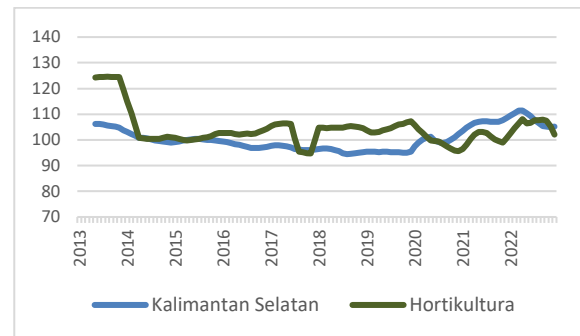


Gambar 1. Perkembangan NTP Tanaman Pangan dengan NTP Kalimantan Selatan.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

Perkembangan NTP tanaman hortikultura dari tahun 2013 – 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada awalnya, NTP tanaman hortikultura berada di atas 100 (kisaran angka 124) pada tahun 2013, jauh dari angka NTP Kalimantan Selatan. Namun, NTP tanaman hortikultura turun drastis hampir menyamai NTP Kalimantan Selatan. Penurunan drastis terjadi lagi hingga di bawah angka 100 pada pertengahan 2017. Setelah itu, NTP tanaman hortikultura naik kembali di atas 100, meskipun tidak melebihi NTP Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, NTP tanaman hortikultura turun perlahan, berbeda dengan NTP Kalimantan Selatan yang mengalami kenaikan sejak tahun 2019. Dalam rentang 10 tahun, angka NTP

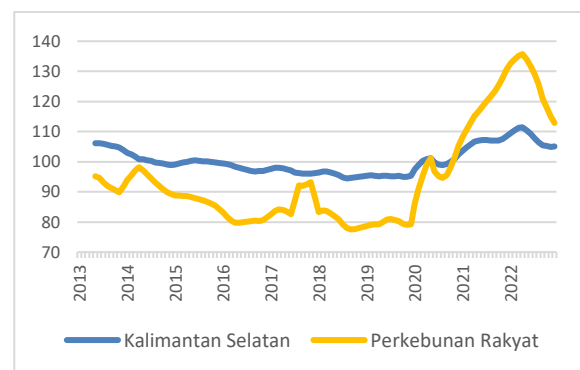
tanaman hortikultura tertinggi adalah pada pertengahan tahun 2013 dengan angka 125,43, sedangkan yang terendah adalah 79,12 pada pertengahan tahun 2017.



Gambar 2. Perkembangan NTP Tanaman Hortikultura dengan NTP Kalimantan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

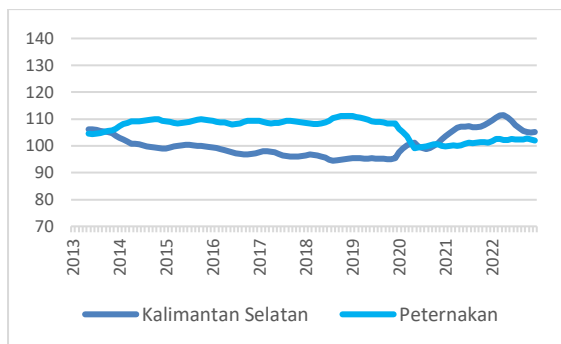
Selama tujuh tahun dari tahun 2013 – pertengahan 2019, NTP perkebunan rakyat selalu berada di bawah angka 100 dan di bawah angka NTP Kalimantan Selatan. Hingga pada tahun 2020, NTP perkebunan rakyat mulai menanjak dan akhirnya mencapai angka 100. NTP perkebunan rakyat kembali menunjukkan penurunan di tahun 2022 tetapi tidak sampai di bawah angka 100. Dalam rentang 10 tahun, angka tertinggi NTP perkebunan rakyat 136,63 di tahun 2022, sedangkan angka terendahnya adalah 75,8 di tahun 2018.



Gambar 3. Perkembangan NTP Perkebunan Rakyat dengan NTP Kalimantan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

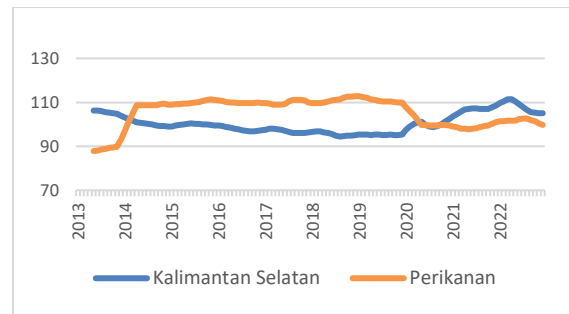
Pada Gambar 4, NTP peternakan di tahun 2013 berada di atas angka 100 tidak berbeda jauh dengan NTP Kalimantan Selatan. Kemudian NTP peternakan menunjukkan kenaikan menjauhi NTP Kalimantan Selatan hingga kisaran angka 110 dan konstan selama 6 tahun di kisaran angka 107 – 111. Grafik peternakan mulai menunjukkan penurunan sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 NTP peternakan turun hingga di bawah angka 100 bersamaan dengan NTP Kalimantan Selatan. Tahun selanjutnya NTP peternakan hanya menunjukkan kenaikan yang cukup lambat tetapi berada di atas angka 100. Dalam rentang 10 tahun, angka NTP peternakan tertinggi adalah pada pertengahan tahun 2018 dengan angka 111,69, sedangkan yang terendah adalah 96,62 pada pertengahan tahun 2020.



Gambar 4. Perkembangan NTP Peternakan dengan NTP Kalimantan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

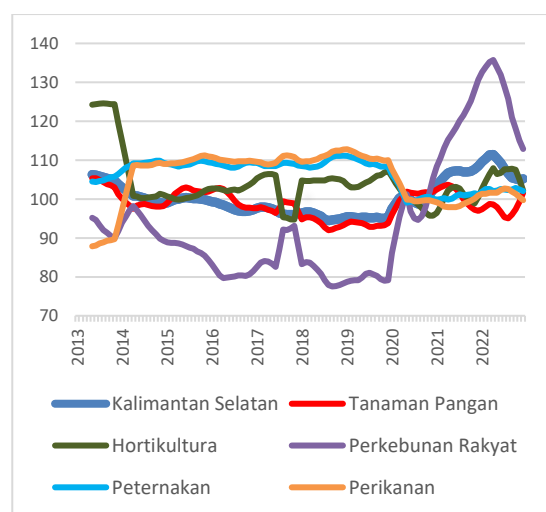
Pada Gambar 5, NTP perikanan menunjukkan dari awal tahun 2013 berada di angka 80-an dan mulai menanjak naik di awal tahun 2014 dengan pergerakan yang cukup drastis. Ditahun tersebut hingga tahun 2020 NTP perikanan cukup stabil di kisaran angka 108 – 113. Grafik NTP perikanan mulai menunjukkan penurunan ditahun 2020, berbanding terbalik dengan NTP Kalimantan Selatan yang menanjak naik. Dalam rentang 10 tahun, angka tertinggi NTP perikanan adalah 113,53 ditahun 2018, sedangkan angka terendahnya adalah 87,48 ditahun 2013.



Gambar 5. Perkembangan NTP Perikanan dengan NTP Kalimantan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

Selanjutnya pada gambar 6 menunjukkan bahwa tahun 2013 – 2022 dengan subsektor pengamatan yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor perikanan, dan subsektor perkebunan rakyat dengan pembandingnya ialah data dari NTP Kalimantan Selatan. Subsektor yang memiliki nilai hampir sama dengan NTP Kalimantan Selatan adalah sektor tanaman pangan. Ditahun 2020, NTP di seluruh subsektor mengalami kesamaan angka di kisaran 100. Hal ini dikarenakan pada saat itu virus Covid-19 mulai memasuki Kalimantan Selatan sejak bulan maret 2020 sehingga Pemerintah Kalimantan Selatan memutuskan untuk menerapkan kondisi kegawatdaruratan dan memberlakukan PSBB. Perekonomian Kalimantan Selatan begitu terpuak dengan menyebarnya Covid-19 dan berakibat pada penurunan perekonomian sebesar 1,81% pada tahun 2020.



Gambar 6. Perkembangan NTP per-subsektor dengan NTP Kalimantan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

Pengujian Analisis Ragam antar NTP Per-Subsektor

Untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan antara NTP per-subsektor dilakukan analisa statistik menggunakan ANOVA.

Tabel 2. Analisis ragam NTP subsektor pertanian

Sk	Db	Jk	Kt	F Hitung
Subsektor Pertanian	4	960,1	240	3,03
Galat	45	3559,3	79,1	
Total	49	4519,4		

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

Seperti yang dilihat pada Tabel 2, $Jk_{\text{subsektor pertanian}}$ antara perlakuan sebesar 960,1 dengan Db sebesar 4 dan Kt 240. Untuk kesalahan dalam perlakuan didapat nilai $Jk_{\text{kesalahan}}$ sebesar 3559,3 dengan Db sebesar 45 dan Kt sebesar 79,1. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai F_{hitung} 3,03. Selanjutnya nilai F yang diperoleh dibandingkan dengan F_{tabel} . Untuk mencari nilai F_{tabel} sendiri menggunakan *F-distribution* dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$), karena $Db_{\text{subsektor pertanian}}$ sebesar 4 dan Db_{galat} sebesar 45, maka ditemukan nilai F_{tabel} ($F_{0,05,4,45}$) sebesar 2,58.

Setelah dilakukan perbandingan ternyata nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} , yang artinya bahwa rata-rata semua variabel adalah sama (H_0) ditolak. Maka dari itu, hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan terdapat perbedaan signifikan diantara nilai rata-rata subsektor pertanian atau dengan kata lain terdapat NTP yang berbeda antar subsektor pertanian diterima.

Guna melengkapi hasil ANOVA maka dilakukan uji Fisher's LSD atau BNT (Beda Nyata Terkecil) sebagai uji lanjutan, dapat yang terlihat pada Tabel 3. Hasil uji BNT memperlihatkan bahwa subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor tanaman hortikultura, dan subsektor tanaman pangan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu, subsektor perkebunan rakyat dan subsektor tanaman pangan juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor tanaman hortikultura memiliki perbedaan yang signifikan

dengan subsektor perkebunan rakyat, berlaku juga sebaliknya.

Tabel 3. Hasil BNT subsektor pertanian

Subsektor Pertanian	N	Rerata NTP subsektor (10 tahun)	Grouping
Peternakan	10	106,351	A
Perikanan	10	105,14017	A
Tan. Hortikultura	10	104,386	A
Tan. Pangan	10	98,8855	A
Perkebunan Rakyat	10	94,7985	B

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013 – 2022), diolah

Dalam Tabel 3 juga menunjukkan bahwa subsektor peternakan merupakan rerata paling tinggi yaitu 106,351. Hal ini dapat diartikan bahwa petani di subsektor peternakan mengalami surplus dalam 10 tahun terakhir. Selain subsektor peternakan, subsektor perikanan dan subsektor tanaman hortikultura juga berada atas nilai 100, tepat diangka 105,14017 dan 104,386. Pendapatan petani di ketiga subsektor tersebut tumbuh lebih cepat dari pengeluarannya, sehingga kesejahteraan petani bisa dikatakan lebih baik.

Berbeda dengan petani subsektor perkebunan rakyat dan subsektor tanaman pangan yang memiliki nilai di bawah angka 100, tepatnya di angka 94,7985 dan 98,8855. Diantara kedua subsektor tersebut, subsektor perkebunan rakyat merupakan subsektor dengan rerata paling rendah atau mengalami defisit dalam 10 tahun terakhir. Dengan rerata NTP di bawah 100 menunjukkan bahwa pendapatan yang di terima oleh petani tumbuh lebih lambat ketimbang pengeluarannya, sehingga tingkat kesejahteraan petani menjadi menurun.

Sebagaimana petani pada umumnya, permasalahan yang biasa ditemani bagi usaha perkebunan rakyat ialah pupuk dan pestisida yang harganya cukup tinggi dengan tanpa subsidi, biaya pengusahaan dan peremajaan yang mahal serta keterampilan budidaya yang terbatas juga di alami oleh rumah tangga pekebun.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Topan (2020), permasalahan yang banyak terjadi terhadap kesejahteraan petani subsektor perkebunan rakyat adalah banyak keluhan yang dikeluarkan oleh masyarakat

terutama pihak petani dari pelaksanaan pada program di perusahaan sawit yaitu mitra inti plasma yang dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan cenderung tidak menguntungkan bagi petani.

Untuk itu dalam melindungi hak masyarakat petani pekebun, pemerintah sudah mengatur dasar hukum dalam aturan undang-undang, namun semuanya kembali kepada “Surat Perjanjian Kemitraan (SPK) Inti Plasma” yang tertuang pada peraturan oleh Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 berisi tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat 2 sebagai syarat. Pada kenyataannya surat perjanjian tersebut kebanyakan dibuat sepihak oleh perusahaan sawit yang menyudutkan dan tidak berpihak pada petani pekebun.

Kebijakan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah saat ini masih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani dalam pembangunan pertanian, dengan menggunakan NTP sebagai indikator utama. Untuk mencapai peningkatan NTP yang diinginkan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor kunci yang memengaruhi kesejahteraan petani. Faktor-faktor tersebut meliputi produksi komoditas pertanian, harga konsumen dan kebutuhan petani, serta sarana produksi yang tersedia bagi petani.

Hal paling mendasar dalam mempengaruhi penerimaan petani adalah hasil produksi. Perihal ini tentu saja merupakan domain Kementerian Pertanian dengan instrumen kebijakan serta program bantuannya untuk meningkatkan produktivitas dan ekstensifikasi yang berfokus pada optimalisasi juga perluasan lahan pertanian.

Isu mengenai kapasitas produksi berbasis lahan sempit perlu dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk mencari solusi dalam merumuskan kerangka kebijakan. Pemerintah juga bisa memberikan dukungan dan insentif untuk meringankan biaya produksi berupa subsidi sarana produksi, jaminan harga produksi pada saat periode puncak panen, subsidi kredit, serta subsidi biaya irigasi.

Kebijakan perdagangan untuk menghindari jatuhnya harga produk akibat impor perlu dilakukan serta perbaikan infrastruktur pertanian juga dinilai penting misalnya perbaikan jaringan irigasi. Dukungan ini

diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Selain itu, program bantuan sosial juga dapat berperan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu subsektor perkebunan rakyat merupakan rerata paling rendah yang mengalami defisit dalam 10 tahun terakhir. Salah satu permasalahan yang biasa ditemui bagi usaha perkebunan ialah pupuk yang harganya cukup tinggi dengan tanpa subsidi, lalu pembiayaan untuk pengusahaan dan peremajaan juga terbilang cukup mahal (seperti tenaga kerja, sarana produksi, dan bensin).

Besarnya biaya pengusahaan dan peremajaan, pemerintah perlu membantu dengan program proses pengusahaan dan peremajaan terhadap tanaman tua serta penyediaan bibit yang baik dan bersertifikat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari subsektor perkebunan rakyat (Aminah, 2017).

Perlindungan hukum untuk petani yang represif serta sanksi yang tegas dari pemerintah berguna dalam menyelesaikan kejadian berupa sengketa lahan. Pada peraturan undang – undang sudah ditentukan terkait perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi ke sewenangan dari pihak lain seperti pengusaha, penguasa serta orang dengan ekonomi yang lebih baik daripada korban. Salah satu asas perlindungan serta pemberdayaan petani ialah adanya keterbukaan dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan petani dengan memperhatikan aspirasi selaku petani dan pemangku kepentingan lainnya, serta didukung oleh pelayanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat setempat (Topan, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada grafik, subsektor yang memiliki nilai hampir sama dengan NTP Kalimantan Selatan adalah subsektor tanaman pangan. Tetapi di tahun 2020, Angka NTP diseluruh subsektor mengalami kesamaan angka di kisaran 100 akibat dari penerapan PSBB oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2022), subsektor pertanian yang mengalami defisit ialah subsektor tanaman pangan yang berada di bawah angka titik impas yaitu dengan rerata nilai 98,8855 serta subsektor perkebunan rakyat dengan rerata nilai paling terendah yaitu

94,7985. Sedangkan perkembangan NTP yang mengalami surplus adalah subsektor peternakan dengan nilai tertinggi berada di atas angka titik impas yaitu 106,351, diikuti subsektor perikanan dengan rerata nilai 105,14017 dan terakhir subsektor tanaman hortikultura berada di atas angka titik impas dengan rerata nilai 104,386

Dalam menganalisis perbandingan NTP, subsektor peternakan, perikanan, tanaman hortikultura dan tanaman pangan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan NTP tanaman pangan dan perkebunan rakyat juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari kelima subsektor tersebut, subsektor peternakan memiliki rerata paling tinggi sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat atau dapat dikatakan lebih baik. Sedangkan subsektor perkebunan rakyat merupakan subsektor yang memiliki rerata lebih rendah dibandingkan subsektor lainnya sehingga tingkat kesejahteraan petani menurun.

Berdasarkan hasil analisis ini, saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan, antara lain :

1. Adanya intervensi dan kontribusi pemerintah yang memiliki peran sebagai pengatur serta pembuat kebijakan sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan petani dengan memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi NTP.
2. Diharapkan pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan petani melalui penyediaan infrastruktur, bantuan berupa subsidi, serta kebijakan pengendalian keluaran konsumsi RT (rumah tangga) (seperti subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, pemberian raskin, dan lain – lain). Hal ini dinilai lebih relevan untuk memperbaiki kesejahteraan petani.
3. Pada penelitian ini perkebunan rakyat merupakan rerata yang paling rendah dalam waktu 10 tahun, sehingga diharapkan pemerintah mampu mengevaluasi penyebab menurunnya NTP perkebunan rakyat. Adapun cara yang dapat dilakukan ialah dengan program penyediaan bibit bersertifikat dan revitalisasi perkebunan, program proses pengusahaan dan peremajaan tanaman tua dan perlindungan hukum untuk petani dari

eksploitasi pihak penguasa maupun pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A.N. (2017). *Perkebunan Kelapa Sawit tak Lagi menggembirakan di Kalsel*. Republika.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Nilai Tukar Petani (NTP)*. SIRUSA, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Gomez, K.A., Arturo, A.G. (1995). *Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian – Edisi Kedua*. UI – Press. Jakarta.
- Krisnamurthi, B. (2002). *Strategi Pembangunan Ekonomi Rakyat : Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Daerah*. Pusat Studi Pembangunan IPB. Bogor.
- Krisnamurthi, B. (2009). *Pengembangan Agribisnis Buah Indonesia. Bunga Rampai Agribisnis Seri Pemasaran*. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Nurasa, T., Rachmat, M. (2016). *Nilai Tukar Petani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Topan, M., Ifrani. (2020). *Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*. Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Yunita D., Sekarningrum B. (2008). *Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Petani*. SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 2(2):25– 37.